



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG





**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

KARO HUKUM	KADIS PMP/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani memberdayakan dan meyejahterakan masyarakat.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Bidang Perizinan adalah bidang yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di lingkup penanaman modal.
13. Perangkat Daerah teknis adalah perangkat daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan sektoral/teknis.
14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko atau *Online Single Submission -Risk Based Approac* yang selanjutnya disingkat *OSS-RBA* adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASISTEN	Pj.SPKDA
			

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3





Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan DPMPPTSP meliputi seluruh urusan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI, dan
 - b. perizinan berusaha Non KBLI;
 - c. perizinan non berusaha Non KBLI; dan
 - d. non perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS-RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

KARO HUKUM	KADAS PMPTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

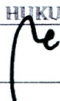



Jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.





KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
 - c. menyusun NSPK standar operasional prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) NSPK standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

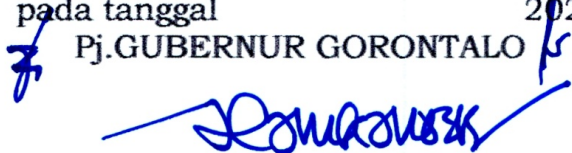
Seluruh perizinan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

KARO HUKUM	KADIS PMTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 6 TAHUN 2023





TANGGAL : 20 Maret 2023

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI

1. 03211 - Pembesaran Pisces/ikan Bersirip Laut
2. 03212 - Pembenihan Ikan Laut
3. 03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut
4. 03214 - Budidaya Karang (coral)
5. 03215 - Pembesaran Mollusca Laut
6. 03216 - Pembesaran Crustacea Laut
7. 03217 - Pembesaran Timbunan Air Laut
8. 03219 - Budidaya Biota air Laut lainnya
9. 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
10. 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung
11. 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba
12. 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
13. 03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar
14. 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
15. 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring tancap
16. 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya
17. 03251 - pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
18. 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau
19. 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau
20. 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
21. 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau
22. 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya
23. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
24. 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
25. 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias
26. 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan
27. 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan
28. 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Hasil Perikanan
29. 47825 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan
30. 47828 - Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan
31. 47815 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan
32. 10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASISTEN	Pj SEKDA
			

33. 10212 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
34. 10214 - Industri Pemindangan Ikan (NA)
35. 10215 - Industri Peragian/Fermentasi Ikan (NA)
36. 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
37. 10292 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya
38. 10294 - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
39. 10295 - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
40. 10299 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
41. 10779 - Industri Produk Masak Lainnya
42. 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
43. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (NA)
44. 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
45. 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias
46. 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
47. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
48. 47245 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
49. 47753 - Perdagangan Eceran Ikan Hias
50. 47754 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

2. Perizinan Berusaha Non KBLI

1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)
3. Buku Kapal Perikanan
4. Surat Izin Penempatan Rumpon
5. Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)
6. Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara nonelektronik)
7. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (Dilaksanakan secara Non Elektronik)





3. Non Perizinan

1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).


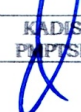


B. PERTANIAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI





1. 01630 Jasa pasca panen
2. 46201 Perdagangan besar padi dan palawija
3. 46311 Perdagangan besar beras
4. 46312 Perdagangan besar buah-buahan
5. 46313 Perdagangan besar sayuran
6. 46319 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.

KARO HUKUM	KABIS PMP/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

7. 47111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket
8. 47211 Perdagangan eceran padi dan palawija
9. 47212 Perdagangan eceran buah-buahan
10. 47213 Perdagangan eceran sayuran
11. 47219 Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
12. 47241 Perdagangan eceran beras
13. 10313 Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
14. 10314 Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
15. 10612 Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
16. 10613 Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
17. 10631 Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
18. 10632 Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung
19. 10772 Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
20. 01252 pertanian buah biji kacang-kacangan
21. 01191 – Pertanian Tanaman Pakan Ternak
22. 01192 - Pembibitan tanaman pakan ternak dan pembibitan BIT (bukan BIT gula)
23. 01411 - Pembibitan sapi budidaya sapi potong
24. 01412 - Pembibitan dan budidaya sapi perah
25. 01413 - Pembibitan dan budidaya kerbau potong
26. 01414 - Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
27. 01450 – Peternakan Babi
28. 01461 – Budi Daya Ayam Ras Pedaging
29. 01462 – Budi Daya Ayam Ras Petelur
30. 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
31. 01464 – Budi Daya Ayam Lokal
32. 01465 - Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek
33. 01466 - Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh
34. 01468 – Pembibitan Ayam Ras
35. 01623 - Jasa Penetasan Telur
36. 01111 - Pertanian Jagung
37. 01112 – Pertanian Gandum
38. 01113 - Pertanian Kedelai
39. 01114 - Pertanian Kacang Tanah
40. 01115 - Pertanian Kacang Hijau
41. 01119 - Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
42. 01121 - Pertanian Padi Hibrida
43. 01122 - Pertanian Padi Inbrida
44. 01135 - Pertanian Aneka Umbi Palawija
45. 10611 - Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
46. 10612 –Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)
47. 10613 –Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
48. 10621 – Industri Pati Ubi Kayu
49. 10631 - Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
50. 10632 -Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung

KARO HUKUM	KADIS PMP/SP	ASISTEN	Pj SEKDA
			

51. 01612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
52. 01640- Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembang- biakan
53. 01611 – Jasa Pengolahan Lahan
54. 01613 – Jasa Pemanenan
55. 01614 – Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara
56. 01619 – Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
57. 01116 - Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
58. 01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
59. 01132 - Pertanian Hortikultura Buah
60. 01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
61. 01134 – Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
62. 01136 - Pertanian Jamur
63. 01139 - Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
64. 01193 – Pertanian Tanaman Bunga
65. 01194 – Pembibitan Tanaman bunga
66. 01210 - Pertanian Buah Anggur
67. 01220 - Pertanian Buah- buahan Tropis dan Sub Tropis
68. 01230 - Pertanian Buah Jeruk
69. 01240 - Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)
70. 01251 - Pertanian Buah beri
71. 01253 - Pertanian Sayuran Tahunan
72. 01199 – Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
73. 01259 - Pertanian Buah Semak Lainnya
74. 01283 - Pertanian Cabai
75. 01285 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
76. 01286 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
77. 01301 - Pertanian tanaman hias
78. 01302 – Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
79. 01118 - Pertanian Biji- bijian penghasil bukan minyak makan
80. 01140 - Perkebunan Tebu
81. 01150 – Perkebunan Tembakau
82. 01252 - Pertanian Buah Biji Kacang- Kacangan
83. 01261 - Perkebunan Buah Kelapa
84. 01262 – Perkebunan Buah Kelapa Sawit
85. 01270 – Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
86. 01281 – Perkebunan Lada
87. 01282 – Perkebunan Cengkeh
88. 01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar
89. 01285 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
90. 01286 - Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
91. 01289 – Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya
92. 01291 - Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
93. 01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
94. 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
95. 10721 - Industri Gula Pasir
96. 10763 – Industri Pengolahan Teh
97. 10671 - Industri Pengolahan Kopi
98. 10423 - Industri Minyak Goreng Kelapa
99. 10731 - Industri Kakao
100. 10722 - Industri Gula Merah

KARO HUKUM	KAMIS PMP/SP	ASISTEN	PI SEKDA
			

101. 01117 - Pertanian Biji- bijian Penghasil Minyak Makan
102. 01137 - Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
103. 01160 - Pertanian Tanaman Berserat
104. 01269 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
105. 20294 - Industri Minyak Atsiri
106. 22121 - Industri pengasapan karet
107. 46444 Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan
108. 46445 - Distributor Obat Hewan
109. 46446 – Perdagangan Besar kosmetik untuk Hewan
110. 46447 – Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan
111. 46448 – Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan
112. 46692 – Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk hewan





- Non Perizinan

1. Rekomendasi izin usaha perkebunan
2. Rekomendasi penyalur benih
3. Rekomendasi produsen benih
4. Rekomendasi pemasukan / pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa lainnya (HPM)
5. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
6. Rekomendasi pertanian sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya

C. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI

1. 16101 Industri penggajian kayu
2. 16102 Industri pengawetan kayu
3. 16105 Industri partikel kayu dan sejenisnya
4. 16211 Industri kayu lapis
5. 16212 Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
6. 16213 Industri panel kayu lainnya
7. 16214 Industri veneer
8. 16215 Industri kayu laminasi
9. 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu
10. 20115 Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
11. 16103 Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenis
12. 16104 Industri pengolahan rotan
13. 10616 Industri tepung terigu
14. 10411 Industri minyak mentah dan lemak nabati
15. 10611 Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya
16. 10612 Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
17. 10613 Industri penggilingan aneka umbi sayuran (termasuk rhizoma)
18. 10621 Industri pati ubi kayu
19. 10622 Industri berbagai macam pati palma
20. 10629 Industri pati dan produk pati lainnya
21. 10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
22. 10632 Industri penggilingan dan pembersihan jagung
23. 10633 Industri tepung beras dan tepung jagung
24. 10634 Industri pati beras dan jagung
25. 10424 Industri pelet kelapa
26. 10722 Industri gula merah

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASIS/EN	PJSEKDA
			

27. 10729 Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
28. 10731 Industri kakao
29. 10779 Industri produk masak lainnya
30. 11090 Industri minuman lainnya
31. 20131 Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik
32. 20294 Industri minyak atsiri
33. 22123 Industri karet remah (crumb rubber)
34. 16101 Industri penggergajian kayu
35. 16102 Industri pengawetan kayu
36. 16105 Industri partikel kayu dan sejenisnya
37. 16211 Industri kayu lapis
38. 16212 Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
39. 16213 Industri panel kayu lainnya
40. 16214 Industri veneer
41. 16215 Industri kayu laminasi
42. 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu
43. 20115 Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
44. 16103 Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenis
45. 10413 Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
46. 10779 Industri produk masak lainnya
47. 37011 Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
48. 37012 Pengumpulan air limbah berbahaya
49. 37021 Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
50. 37022 Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya
51. 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan
52. 02209 Usaha kehutanan lainnya





- **non perizinan**

1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Persetujuan berusaha pengolahan hasil hutan (kurang dari 6.000 m³pertahun).
3. Persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan
4. Rekomendasi teknis perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI**

1. 07101 Pertambangan Pasir Besi
2. 07102 Pertambangan Bijih Besi
3. 07291 Pertambangan Bijih Timah
4. 07292 Pertambangan Bijih Timah Hitam
5. 07293 Pertambangan Bijih Bauksit
6. 07294 Pertambangan Bijih Tembaga
7. 07295 Pertambangan Bijih Nikel
8. 07296 Pertambangan Bijih Mangan
9. 07299 Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak mengandung Bijih Besi
10. 07301 Pertambangan Emas dan Perak
11. 07309 Pertambangan Bijih Logam Lainnya

KARO HUKUM	KAMIS PMPTSP	ASISTEN	PJSEKDA
			

12. 08101 Penggalian batu Hias dan Batu Bangunan
13. 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping
14. 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu
15. 08104 Penggalian Pasir
16. 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat
17. 08106 Penggalian Gips
18. 08107 Penggalian Tras
19. 08108 Penggalian Batu Apung
20. 08109 Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya
21. 08911 Pertambangan Belerang
22. 08912 Pertambangan Fosfat
23. 08913 Pertambangan Nitrat
24. 08914 Pertambangan Yodium
25. 08915 Pertambangan Potash (Kalium karbonat)
26. 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk lainnya
27. 08991 Pertambangan Batu Mulia
28. 08992 Pertambangan Feldspar dan Kalsit
29. 08993 Pertambangan Aspal Alam
30. 08994 Penggalian Asbes
31. 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
32. 08999 Pertambangan dan penggalian lainnya YTDL
33. 46641 Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
34. 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
35. 09900 Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
36. 20115 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
37. 35111 Pembangkitan Tenaga Listrik
38. 35112 Transmisi Tenaga Listrik
39. 35113 Distribusi Tenaga Listrik
40. 35114 Penjualan Tenaga Listrik
41. 35115 Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu kesatuan
42. 35116 Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
43. 35117 Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan
44. 35118 Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
45. 35121 Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
46. 35122 Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik
47. 35129 Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik lainnya
48. 43211 Instalasi Listrik
49. 46641 Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
50. 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
51. 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi
52. 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
53. 85497 Pendidikan Teknik Swasta
54. Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Eksplorasi

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
<i>ke</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>ls</i>

55. Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi

- Perizinan Berusaha Non KBLI

1. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik
2. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
4. Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung (Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan hutan produksi dan Kawasan hutan lindung, wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan)




- Non perizinan

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)




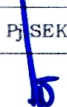
E. PERINDUSTRIAN

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI


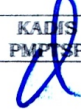


1. 10411 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
2. 10412 Industri Margarine
3. 10437 Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
4. 10616 Industri Tepung Terigu
5. 10623 Industri Glukosa dan Sejenisnya
6. 10635 Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung
7. 10721 Industri Gula Pasir
8. 10731 Industri Kakao
9. 10791 Industri Makanan Bayi
10. 11032 Industri Malt
11. 11051 Industri Air Kemasan
12. 12011 Industri Sigaret Kretek Tangan
13. 12012 Industri Rokok Putih
14. 12013 Industri Sigaret Kretek Mesin
15. 12019 Industri Rokok Lainnya
16. 12099 Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
17. 13113 Industri Pemintalan Benang Jahit
18. 13991 Industri Kain Pita
19. 13992 Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
20. 13993 Industri Nonwoven
21. 13994 Industri Kain Ban
22. 17013 Industri Kertas Berharga
23. 17014 Industri Kertas Khusus
24. 18112 Industri Pencetakan Khusus
25. 10213(Industri Pembekuan Ikan)
26. 10216(Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi)
27. 10217 (Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan)
28. 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan)

KARO HUKUM	KADIS PMP/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





29. 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
30. 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
31. 10297 Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
32. 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
33. 10413 Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
34. 10414 Industri Minyak Ikan
35. 10415 Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
36. 10434 Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
37. 10590 Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya
38. 10636 Industri Minyak Dari Jagung dan Beras
39. 10732 Industri Makanan Dari Cakelat dan Kembang Gula
40. 10740 Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
41. 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
42. 10771 Industri Kecap
43. 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa
44. 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan)
45. 10212 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan)
46. 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
47. 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya)
48. 10292 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya)
49. 10295 Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
50. 10298 Industri Pengolahan Rumput Laut
51. 10393 Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Tahu dan Tempe
52. 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa
53. 10424 Industri Tepung dan Pelet Kelapa
54. 10435 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
55. 10436 Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
56. 10490 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
57. 10531 Industri Pengolahan Es Krim
58. 10611 Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya
59. 10612 Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
60. 10613 Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
61. 10614 Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
62. 10615 Industri Makanan Sereal
63. 10621 Industri Pati Ubi Kayu
64. 10622 Industri Berbagai Macam Pati Palma
65. 10629 Industri Pati Lainnya
66. 10633 Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
67. 10634 Industri Pati Beras dan Jagung
68. 10710 Industri Produk Roti dan Kue
69. 10722 Industri Gula Merah
70. 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop

KARO HUKUM	KADIS EMP/SP	ASISTEN	PJ SEKDA
			





71. 10734 Industri Kembang Gula
72. 10739 Industri Kembang Gula Lainnya
73. 10761 Industri Pengolahan Kopi
74. 10763 Industri Pengolahan Teh
75. 10772 Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
76. 10779 Industri Produk Masak Lainnya
77. 10793 Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
78. 10795 Industri Krimer Nabati
79. 10801 Industri Ransum Makanan Hewan
80. 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan
81. 11040 Industri Minuman Ringan
82. 13123 Industri Bulu Tiruan Tenunan
83. 13924 Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
84. 13926 Industri Karung Bukan Gani
85. 13941 Industri Tali
86. 13942 Industri Barang dari Tali
87. 15123 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
88. 15129 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
89. 18111 Industri Pencetakan Umum
90. 13111 Industri Persiapan Serat Tekstil
91. 13112 Industri Pemintalan Benang
92. 13911 Industri Kain Rajutan
93. 13913 Industri Bulu Tiruan Rajutan
94. 13921 Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
95. 13922 Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
96. 13923 Industri Bantal dan Sejenisnya
97. 13925 Industri Karung Gani
98. 13929 Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
99. 13930 Industri Karpét dan Permadani
100. 14302 Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
101. 14303 Industri Rajutan Kaas Kaki dan Sejenisnya
102. 15122 Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
103. 15201 Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
104. 15202 Industri Sepatu Olah raga
105. 15203 Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
106. 15209 Industri Alas Kaki Lainnya
107. 17012 Industri Kertas Budaya
108. 17019 Industri Kertas Lainnya
109. 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
110. 17091 Industri Kertas Tissue
111. 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
112. 19100 Industri Produk dari Batu Bara
113. 19291 Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi

KARO HUKUM	KADIS PMD/SP	ASISTEN	PA SEKDA
			





114. 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
115. 10432 Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
116. 10762 Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)
117. 12091 Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
118. 13912 Industri Kain Sulaman/Bordir
119. 16105 Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
120. 16299 Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl
121. 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
122. 18113 Industri Pencetakan 3D Printing
123. 19213 Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
124. 10433 Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
125. 11052 Industri Air Minum Isi Ulang
126. 13122 Industri Kain Tenun Ikat
127. 14120 Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
128. 19212 Industri Pembuatan Minyak Pelumas
129. 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng)
130. 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng)
131. 10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
132. 10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
133. 10723 Industri Sirop
134. 11050 Industri Air Minum dan Air Mineral
135. 13121 Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
136. 13131 Industri Penyempurnaan Benang
137. 13132 Industri Penyempurnaan Kain
138. 13133 Industri Pencetakan Kain
139. 13999 Industri Tekstil Lainnya Ytdl
140. 14111 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
141. 14112 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
142. 14131 Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
143. 14132 Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
144. 14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
145. 14301 Industri Pakaian Jadi Rajutan
146. 15111 Industri Pengawetan Kulit
147. 15112 Industri Penyamakan Kulit
148. 15113 Industri Pencelupan Kulit Bulu
149. 15114 Industri Kulit Buatan/Imitasi
150. 15121 Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
151. 17011 Industri Bubur Kertas (*Pulp*)
152. 13134 Industri Batik
153. 13995 Industri Kapuk
154. 16103 Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya
155. 16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
156. 16292 Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
157. 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller

KARO HUKUM	KABIS P/PTSP	ASISTEN	P/SEKDA
			





158. 16294 Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
159. 18201 Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
160. 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
161. 10294 Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
162. 10311 Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran
163. 10391 Industri Tempe Kedelai
164. 10392 Industri Tahu Kedelai
165. 10421 Industri Kopra
166. 10774 Industri Pengolahan Garam
167. 10792 Industri Kue Basah
168. 16102 Industri Pengawetan Kayu
169. 16104 Industri Pengolahan Rotan
170. 16211 Industri Kayu Lapis
171. 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
172. 16213 Industri Panel Kayu Lainnya
173. 16214 Industri Veneer
174. 16215 Industri Kayu Laminasi
175. 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu
176. 16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
177. 16230 Industri Wadah dari Kayu
178. 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
179. 19292 Industri Briket Batu Bara
180. 10312 Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
181. 10313 Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
182. 10314 Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
183. 10320 Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
184. 10330 Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
185. 10399 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah- Buah dan Sayuran
186. 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa
187. 10532 Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
188. 10631 Industri Penggilingan Padidan Penyosohan Beras
189. 10632 Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
190. 10733 Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
191. 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
192. 10796 Industri Dodol
193. 10799 Industri Produk Makanan Lainnya
194. 11090 Industri Minuman Lainnya
195. 13996 Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
196. 16101 Industri Penggergajian Kayu
197. 18120 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
198. 18202 Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
199. 20292 Industri Bahan Peledak
200. 21014 Industri Bahan Farmasi untuk Hewan
201. 22111 Industri Ban Luar dan Ban Dalam
202. 22210 Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan

KARO HUKUM	KADIS PMDSP	ASISTEN	PJSEKDA
			





203. 22230 Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
204. 22291 Industri Barang Plastik Lembaran
205. 23111 Industri Kaca Lembaran
206. 23112 Industri Kaca Pengaman
207. 23119 Industri Kaca Lainnya
208. 23941 Industri Semen
209. 23955 Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
210. 23956 Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan industry
211. 25113 Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
212. 25995 Industri Lampu dari Logam
213. 26110 Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
214. 26310 Industri Peralatan Telepon dan Faximili
215. 26320 Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*)
216. 26420 Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
217. 26710 Industri Peralatan Fotografi
218. 26791 Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
219. 26792 Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
220. 27201 Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
221. 27203 Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
222. 27310 Industri Kabel Serat Optik
223. 27510 Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
224. 27520 Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
225. 28172 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
226. 28173 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
227. 28174 Industri Mesin Fotokopi
228. 29101 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
229. 29102 Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
230. 20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
231. 20124 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
232. 20126 Industri Pupuk Hara Mikro
233. 20127 Industri Pupuk Pelengkap
234. 20213 Industri Zat Pengatur Tumbuh
235. 20233 Industri Kosmetik untuk Hewan
236. 20234 Industri Perekat Gigi
237. 20296 Industri Minyak Atsiri rantai tengah
238. 21023 Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
239. 22194 Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
240. 24103 Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
241. 26220 Industri Perlengkapan Komputer
242. 26511 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
243. 26512 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
244. 26520 Industri Alat Ukur Waktu
245. 26601 Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
246. 27111 Industri Motor Listrik
247. 27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik

KARO HUKUM	KADIS PMP/PTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

248. 27113 Industri Pengubah Tegangan (*Transformator*), *Pengubah Arus (Rectifier)* dan *Pengontrol Tegangan (Voltage Stablizen)*
249. 27120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
250. 27401 Industri Bola Lampu Pijar Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
251. 27402 Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
252. 27403 Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi
253. 27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya
254. 28111 Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
255. 28112 Industri Motor Pembakaran Dalam
256. 28160 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
257. 28191 Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
258. 28199 Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl
259. 28224 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
260. 28263 Industri Mesin Tekstil
261. 28264 Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
262. 28292 Industri Mesin Pabrik Kertas
263. 20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
264. 20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
265. 20114 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
266. 20122 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
267. 20123 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
268. 20125 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
269. 20129 Industri Pupuk Lainnya
270. 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
271. 20212 Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
272. 20214 Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
273. 20221 Industri Cat dan Tinta Cetak
274. 20222 Industri Pernis (Termasuk Mastik)
275. 20223 Industri Lak
276. 20291 Industri Perekat/Lem
277. 20293 Industri Tinta
278. 20295 Industri korek api
279. 20299 Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl
280. 21013 Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
281. 21015 Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
282. 22112 Industri Vulkanisir Ban
283. 22193 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
284. 23911 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
285. 23919 Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
286. 23931 Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
287. 23932 Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
288. 23933 Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
289. 23939 Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan

KARO HUKUM	KADIS PMTSP	ASISTEN	Pj SEKDA
			





290. 23957 Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
291. 23961 Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
292. 23123 Industri Kemasan dari Kaca
293. 24203 Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
294. 25994 Industri Pembuatan Profil
295. 25920 Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
296. 27404 Industri Lampu Led
297. 28152 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
298. 29200 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri *Trailer* dan *Semi Trailer*
299. 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor roda Empat atau Lebih
300. 20231 Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
301. 20131 Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
302. 20232 Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
303. 21012 Industri Produk Farmasi untuk Manusia
304. 21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional
305. 21022 Industri Produk Obat Tradisional
306. 24202 Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
307. 25932 Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertukangan
308. 26391 Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)
309. 26800 Industri Media Magnetik dan Media Optik
310. 28261 Industri Kabinet Mesin Jahit
311. 25130 Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas
312. 25931 Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
313. 26513 Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
314. 26514 Industri Alat Uji dalam Proses Industri
315. 26602 Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektro terapi
316. 27202 Industri Akumulator Listrik
317. 28120 Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
318. 28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
319. 28171 Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
320. 28180 Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
321. 28192 Industri Mesin Timbangan
322. 28193 Industri Mesin Pendingin
323. 28210 Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
324. 28221 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
325. 28223 Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
326. 28230 Industri Mesin Metalurgi
327. 28240 Industri Mesin Penambangan, Penggalan dan Konstruksi
328. 28250 Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





329. 28262 Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
330. 28265 Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
331. 28291 Industri Mesin Percetakan
332. 28299 Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
333. 20116 Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
334. 20121 Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
335. 20128 Industri Media Tanam
336. 22191 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
337. 22192 Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
338. 22199 Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl
339. 22220 Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
340. 22292 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
341. 22293 Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
342. 22299 Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl - Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
343. 23121 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
344. 23122 Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
345. 23123 Industri Kemasan dari Kaca
346. 23129 Industri Barang Lainnya dari Kaca
347. 23921 Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
348. 23922 Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
349. 23923 Industri Peralatan Saniter dari Porselen
350. 23929 Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
351. 23942 Industri Kapur
352. 23943 Industri Gips
353. 23951 Industri Barang dari Semen
354. 23952 Industri Barang dari Kapur
355. 23952 Industri Barang dari Kapur
356. 23953 Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
357. 23954 Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi
358. 23959 Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
359. 23962 Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
360. 23963 Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan
361. 23969 Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
362. 25111 Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
363. 25991 Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya
364. 25993 Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
365. 25999 Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
366. 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya

KARO HUKUM	KADIS PNPTSP	ASISTEN	P/SEKDA
<i>rk</i>	<i>Q</i>	<i>AS</i>	<i>bs</i>

367. 26210 Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
368. 26399 Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
369. 26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
370. 26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
371. 27330 Industri Perlengkapan Kabel
372. 27409 Industri Peralatan Penerangan Lainnya
373. 28130 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
374. 28151 Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
375. 28179 Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
376. 20115 Industri Kirnia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
377. 20117 Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
378. 20118 Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
379. 20119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
380. 22121 Industri Pengasapan Karet
381. 22122 Industri Remilling Karet
382. 22123 Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*)
383. 23990 Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
384. 24204 Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
385. 25112 Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
386. 25119 Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
387. 25933 Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
388. 25934 Industri Peralatan Umum
389. 25940 Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
390. 25951 Industri Barang dari Kawat
391. 25952 Industri Paku, Mur dan Baut
392. 25992 Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
393. 27530 Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
394. 25120 Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Lagam
395. 25910 Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
396. 28113 Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
397. 24205 Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
398. 24310 Industri Pengecoran Besi dan Baja
399. 24320 Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
400. 20132 Industri Karet Buatan
401. 20301 Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
402. 20302 Industri Serat Stapel Buatan
403. 21011 Industri Bahan Farmasi untuk Manusia
404. 24101 Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*)

KARO HUKUM	KADIS PMP/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

405. 24102 Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)
406. 24201 Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
407. 25200 Industri Senjata dan Amunisi
408. 27320 Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
409. 30112 Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan terapung
410. 30921 Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
411. 32112 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan pribadi
412. 32113 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
413. 32114 Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
414. 32115 Industri Perhiasan Mutiara
415. 32119 Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
416. 32120 Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
417. 32202 Industri Alat Musik Bukan Tradisional
418. 32300 Industri Alat Olahraga
419. 32401 Industri Alat Permainan
420. 32402 Industri Mainan Anak-Anak
421. 32501 Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
422. 32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
423. 32503 Industri Kaca Mata
424. 32509 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya
425. 32901 Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
426. 32902 Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
427. 33133 Reparasi Peralatan Fotografi Dan optic
428. 33149 Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
429. 37021 Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
430. 37022 Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
431. 30111 Industri Kapal dan Perahu
432. 30120 Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
433. 30200 Industri Lokomotif dan Gerbang Kereta
434. 30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
435. 32111 Industri Permata
436. 32904 Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
437. 33151 Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
438. 38301 Daur Ulang Barang Logam
439. 45201 Reparasi Mobil
440. 45407 Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
441. 58130 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah
442. 10130 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas)
443. 30300 Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya

KARO HUKUM	KADIS PMD/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

444. 30911 Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
445. 33152 Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
446. 33153 Reparasi Pesawat Terbang
447. 35301 Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
448. 32201 Industri Alat Musik Tradisional
449. 32903 Industri Kerajinan
450. 32909 Industri Pengolahan Lainnya
451. 33119 Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
452. 33190 Reparasi Peralatan Lainnya
453. 38212 Produksi Kompos Sampah Organik
454. 30113 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
455. 30922 Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
456. 31001 Industri Furnitur dari Kayu
457. 31002 Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
458. 31009 Industri Furnitur Lainnya
459. 32905 Industri Serat Sabut Kelapa
460. 33111 Reparasi Produk Logam Siap Pa sang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
461. 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
462. 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
463. 33131 Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
464. 33132 Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi
465. 33141 Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
466. 33142 Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
467. 33200 Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
468. 30400 Industri Kendaraan Perang
469. 30990 Industri Alat Angkutan Lainnya
470. 31003 Industri Furnitur dari Plastik
471. 31004 Industri Furnitur dari Logam
472. 33159 Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
473. 35302 Produksi Es
474. 38302 Daur Ulang Barang Bukan Logam
475. 32906 Industri Produksi Radioisotop
476. 32907 Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium
477. 33112 Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi
478. 41013 Konstruksi Gedung Industri
479. 58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software)
480. 59111 Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
481. 59112 Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
482. 59121 Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
483. 59122 Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
484. 61925 Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
485. 61929 Jasa Multimedia Lainnya

KARO HUKUM	KADIS PMPTSP	ASIS/EN	Pj/SEKDA
<i>Me</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 486. 62011 Aktivitas Pengembangan *Video Game*
- 487. 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)
- 488. 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- 489. 62024 Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet Of Things* (IoT)
- 490. 63111 Aktivitas Pengolahan Data
- 491. 63121 Portal *Web* dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
- 492. 63122 Portal *Web* dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- 493. 62021 Aktivitas Konsultasi Keamanan informasi
- 494. 62029 Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- 495. 63112 Aktivitas Hosting dan YBDI
- 496. 62090 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
- 497. 68130 Kawasan Industri
- 498. 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- 499. 72104 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
- 500. 74100 Aktivitas Perancangan Khusus
- 501. 77391 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak OpsiMesin dan Peralatan Industri Pengolahan
- 502. 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
- 503. 72109 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
- 504. 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
- 505. 71201 Jasa Sertifikasi
- 506. 71202 Jasa Pengujian Laboratorium
- 507. 71203 Jasa Inspeksi Periodik
- 508. 71204 Jasa Inspeksi Teknik instalasi
- 509. 71205 Jasa Kalibrasi/Metrologi
- 510. 71206 Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)
- 511. 71209 Analisa dan Uji Teknis Lainnya
- 512. 74909 Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
- 513. 77301 Aktivitas Penyewaandan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri
- 514. 82920 Aktivitas Pengepakan
- 515. 95110 Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
- 516. 95120 Reparasi Peralatan Komunikasi
- 517. 95210 Reparasi Alat- Alat Elektronik Konsumen
- 518. 95220 Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
- 519. 95240 Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah
- 520. 95230 Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit
- 521. 95299 Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya

F. PERDAGANGAN

- 1. 47221 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol

KARO HUKUM	KADIS PM/PS	ASISTEN	Pj SEKDA
<i>Ne</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

G. KOPERASI

1. 64141(Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer))
2. 64142(Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer))
3. 64143(Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder))
4. 64144(Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder))
5. 64145(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer))
6. 64146(Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer))
7. 64147(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder))
8. 64148(Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder))

H. PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;

68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

- Perizinan Berusaha Non KBLI;

1. Izin pengusahaan sumber daya air (wilayah sungai lintas kabupaten/kota)
2. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan (bagian-bagian jalan provinsi)

- Perizinan Non Berusaha Non KBLI;

1. PKKPR untuk Kegiatan Non Berusaha





- non perizinan

2. PKKPR untuk Kegiatan Berusaha;

I. TRANSPORTASI

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI




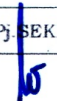
1. 49442 Angkutan Jalan Rel Wisata
2. 49450 Angkutan Jalan Rel Lainnya
3. 52222 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
4. 52223 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
5. 50211 Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
6. 50216 Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang
7. 42103 Kontruksi Jalan Rel
8. 52229 Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya
9. 50111 Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
10. 50141 Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum

KARO HUKUM	KADIS PM/TSP	ASISTEN	PJ SEKDA
			





11. 52240 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
12. 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
13. 49426 Angkutan Sewa Khusus
14. 49216 Angkutan Bus Khusus
15. 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya
16. 49229 Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya
17. 50212 Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
18. 50213 Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi
19. 50221 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan
20. 50222 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
21. 50112 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang
22. 50132 Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
23. 49421 Angkutan Taksi
24. 50217 Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang
25. 49431 Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
26. 52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
27. 52298 Aktivitas Tally Mandiri
28. 50135 Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
29. 42914 Pengerukan
30. 43120 Penyiapan Lahan
31. 50223 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
32. 49213 Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
33. 49412 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, dalam Trayek
34. 49429 Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
35. 50226 Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota untuk Barang
36. 50114 Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
37. 50131 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
38. 50134 Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang
39. 52109 Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
40. 50227 Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk Barang

- Perizinan Berusaha Non KBLI;

1. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
2. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
3. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum
4. Izin operasi sarana perkeretaapian umum
5. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus
6. Izin operasi perkeretaapian khusus
7. Pengalihan Izin perkeretaapian khusus

KARO HAKUM	KADIS PM/OTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

8. Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)
9. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
10. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
11. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
12. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)
13. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (Risiko Menengah Rendah)
14. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (Risiko Menengah Rendah)
15. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)
16. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)
17. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (Risiko Menengah Rendah)
18. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan : 1. Perusahaanmuat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan Kapal; 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Resiko Menengah Rendah)
19. Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan Bongkar Muat; 2. Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Depo Peti Kemas; 4. Tally Mandiri; 5. Angkutan Perairan Pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan Kapal; 9. Keagenan Kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Resiko Rendah)
20. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)
21. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)
22. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)
23. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)
24. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)
25. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)




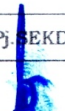
KARO HUKUM	KADIS PME/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

26. Izin pembangunan / pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)
27. Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)
28. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)
29. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)
30. Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)
31. Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)
32. Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)
33. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
34. Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
35. Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
36. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
37. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)
38. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

J. KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN

- Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI

1. 21022 – Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (UKOT)
2. 86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium medis kelas pratama)
3. 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah sakit pemerintah kelas B)
4. 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (Pedagang besar farmasi cabang)
5. 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Cabang distributor alat kesehatan)
6. 46447 - Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan (Pedagang besar farmasi cabang)
7. 86103 – Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Rumah sakit swasta kelas B)
8. 46442 – Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia (Pedagang besar obat tradisional)
9. 46443 – Perdagangan Besar Kosmetik untuk (Pedagang besar kosmetika)

KARO HUKUM	KADIS PNPTSP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- **Perizinanberusaha Non KBLI**

1. Sertifikat standard penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)
2. Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama
3. Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit
4. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan
5. Sertifikat standard penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT
6. Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik

K. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI**

1. 85220 - Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
2. 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta
3. 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
4. 85122 - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta



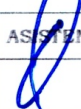

- **Perizinan Berusaha Non KBLI**

1. Izin pendirian satuan pendidikan
2. Izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK

L. PARIWISATA

- **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI**

1. 93222 Pengelolaan Goa
2. 49442 Angkutan Jalan Rel Wisata
3. 50113 Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata
4. 50122 Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
5. 50213 Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI
6. 55193 Vila (bintang 2 dan 3)
7. 56101 Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit
8. 56210 Jasa Boga untuk suatu event tertentu
9. 56301 Bar
10. 56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
11. 55120 Hotel Melati
12. 55110 Hotel Bintang
13. 55194 Apartemen Hotel
14. 93223 Wisata Petualangan Alam
15. 56302 Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makan minum
16. 93113 Fasilitas Gelanggang/Arena
17. 93291 Klub Malam
18. 93293 Usaha Arena Permainan

KARO HUKUM	KADIS PMP/SP	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

19. 93294 Diskotek
20. 93241 Arung Jeram
21. 93242 Wisata Selam
22. 93245 Wisata Memancing
23. 93246 Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung dan Wisata Tirta Lainnya
24. 93249 Wisata Olah Raga Minat Khusus, Wisata Tirta Lainnya
25. 96122 Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)

M. KETENAGAKERJAAN

- **Perizinan Berusaha Non KBLI**

1. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.
2. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

 GUBERNUR GORONTALO



HAMKA HENDRA NOER